

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

1. Pengertian Tindak Pidana (*jarimah*).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu, *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Namun dalam berbagai literatur hukum, ada beberapa terjemahan dari istilah *strafbaar fait* yaitu¹:

- a. Tindak pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Delik.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan². Maka

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005), hal. 67

² Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidanan dan Delik-delik Khusus.* (Bandung: PT Karya Nusantara 1979), hal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhananya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Dalam hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan *jarimah* dan *jinayah*.

a. *Jarimah*.

تعرف الجرام في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير³

“*jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*”

Para ahli fikih mendefinisikan *al-jinayat* adalah bentuk jamak dari *jinayah*, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan⁴. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan *jarimah* apabila dilarang oleh *syari'ah*. Maka ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana ataupun delik pada hukum pidana positif.

Al-Mawardi Mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير⁵

Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor : Karisma Ilmu, 2007), hal. 87.

⁴ Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1 & 2 (Bekasi: PT.Darul Falah)

⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*. Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1973), Hal. 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Jinayah*.

Para fukaha sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*. Dimana semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha-fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jinyah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.

Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimahhudud* dan *qishas* saja⁶.

Secara etimologi *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat.⁷ Sedangkan secara terminologi, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.

2. Jarimah Zina

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1990), hal. 2

⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Bogor : Karisma Ilmu, 2007)hal. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarimah zina merupakan bagian dari *jarimah hudud*. Sedangkan *Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya, hukumannya juga ditentukan secara tegas dan jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. *Jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak tuhan⁸.

Salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam *jarimah hudud* adalah zina.

Menurut H. A Djazuli dengan mengutip pendapat ulama malikiyah, zina adalah *mewat'inya* seorang laki-laki *mukallaf* terhadap *farj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama syafi'iyah mendefinisikan zina dengan memasukan *zakar* ke dalam *farj* yang haram dengan tidak *subhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu⁹.

a. Unsur-unsur zina

Dari definisi zina diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur zina meliputi:

1). Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan yang dalam kemaluan. Meskipun cuma sedikit, dan ada penghalang yang tipis selagi tidak menghalangi pelaku untuk merasakan kenikmatan itu tetap dikatakan zina¹⁰

2). Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

⁸ H.Rahmat Hakim, *HukumPidanaIslam* (Fikih JINAYAH), (Bandung: Pustaka Setia. 2000), Hal. 26

⁹ H.A Djazuli, *FiqhJinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2000), hal. 35

¹⁰ Ahmad wardi Muslih. *HukumPidanaIslam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hal. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pelaku melakukan sesuatu perbuatan persetubuhan sedangkan ia mengetahui wanita yang disetubuhinya tersebut adalah wanita yang haram baginya. Unsur melawan hukum atau niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat ia melakukan perbuatan yang dilarang itu¹¹.

b. Dasar hukum dan sanksi zina

Terhadap hukuman pelaku zina, ditentukan tiga bentuk hukuman yaitu: hukuman cambuk, hukuman pengasingan dan rajam. Dua hukuman yang pertama yakni julid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku pezina *Ghair Mughsan* yaitu pezina yang belum menikah sedangkan bagi pezina *muhsan* orang yang telah menikah atau telah putus pernikahannya diberlakukan hukuman rajam¹².

Untuk lebih jelasnya mengenai hukuman bagi pezina dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

¹¹ Ibid

¹² H. Rahmat Hakim. *Op.cit.*, hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hadits Rasulullah SAW

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا، الْبَكَرَ بِالْبَكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَ نَضَى سَنَةً
وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي)¹³

Ambilah dariku, ambilah dari ku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam (Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu daud dan Tarmudzi)

Adapun alat bukti dalam jarimah zina adalah:

- 1) Asanya saksi dari empat orang laki-laki yang memenuhi syarat dan melihat perbuatan tersebut.
- 2) Pengakuan yang dilakukan sebanyak empat kali.
- 3) *Qarinah* tanda-tanda yang mengarah pada hasil perzinaan tersebut seperti hamilnya wanita yang tidak bersuami tersebut.

3. Jarimah Risywah

ما يتوصل به الإنسان إلى قضاء حاجته مما بآفة من مال أو مدارجة و مدهانة¹⁴

(Segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginan, baik karena kecintaannya kepada harta, kedudukan, dan karena penjiwaan)

Dalam pengertian terminologi, Ibn Al-atsir mendefinisikan *Al-risywah* adalah mengantar sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu. Dengan kata lain *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan . *al-Rasywah* diambil dari kata *al-risyah* yang berarti tali yang dapat mengantarkan

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hal. 122

¹⁴M. Nurul irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011.), hal. 171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke air disumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan¹⁵.

Dalam kasus risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi, (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut disebut (*al-murtasy*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus risywah tertentu bukan hanya penerima dan pemberi serta objek pemberian, melainkan juga melibatkan unsur lain seperti broker atau perantara antara pihak kedua dan pihak ketiga bahkan juga melibatkan orang kelima yakni pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud¹⁶.

a. Unsur-unsur *Risywah*

Adapun unsur-unsur risywah sebagaimana dikutip dalam buku Nurul Irvan adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau dalam rangka agar seseorang berbuat zalim.
- 2) Sesuatu yang diberikan untuk mewujudkan yang salah dan membatalkan yang benar.
- 3) Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan.

¹⁵ Eryvn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh(eds), *Fikih Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB:Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003),hal. 276

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011.),hal 90

¹⁷ *Ibid.*,hal. 168

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim dengan maksud agar diberikan keputusan yang menguntungkan bagi si pemberi atau keputusannya itu dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pemberi.
- 5) Seseuatu yang diberikan karena adanya permintaan dan tidak diberikannya sesuatu adari pemberi suap dengan maksud agar diputuskan dengan cara yang salah atau bahkan kebenaran bisa ditolak
- 6) Sesuatu yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar mempengaruhi keputusan sesuai dengan keinginan, pemberian itu bisa berupa harta, berupa pelayanan, dan bisa berupa prestise.

b. Dasar hukum dan Sanksi Jarimah Risywah

Penyuap atau penerima suap dalam masalah *risywah* kedua-duanya sama-sama haram dan mendapatkan dosa besar, sebagaimana yang telah di syari'atkan oleh Nash dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yanglainDiantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*

Hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم الرّا شي والمرثي في الحكم
(رواه ي أحمد وأبو داود والترمذي)¹⁸

“dari Abi Hurairah rasullah berkata bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi)”

B. Hukuman (*Uqubah*)

1. Pengertian Hukuman

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *Rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia¹⁹.

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع²⁰
Hukuman adalah balasan yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syariat.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan hukuman atas kemaksiatan disebut *hudud* karena secara umum hukuman itu mencegah seseorang yang pernah bermaksiat untuk tidak melakukan itu kembali, yang dengan kemaksiatan itu pelakunya dihukum²¹

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa *Uqubah* adalah:

العقوبة هي زوا جرو ضعها الله تعالى للردع عن إرتكاب ما حظر وترك ما أمر به²²

¹⁸ Muhammad ibn Ali Asy-syaukani, *Nail Al-athar*. Jilid 9 (Beirut: Dar Fikr, tth), hal. 172

¹⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Op.cit.*, hal. 25

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hal. 409

²¹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* jilid 3 (Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara), hal. 256

²² Al-Mawardi *Op.Cit.*, hal. 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman adalah bentuk ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan kepadanya

2. Tujuan Hukuman

Tujuan hukum adalah untuk memelihara masyarakat untuk upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya, sebagai upaya pencegahan atau balasan yang sesuai dengan perbuatannya, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran untuk mendidik masyarakat, sebagai balasan atau perbuatan terhadap perbuatannya.²³

Tujuan dari hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan serta merangsang untuk berlaku taat. Tujuan pokok dijatuhkannya hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-rad-u*) dan pengajaran, serta pendidikan (*al-islah wat-tahzib*).²⁴

Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbiatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus mengulangi perbuatannya, dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah.

²³ Ibid, Rahmat Hakim, hal. 64-65

²⁴ Shalih bin Fauzan Al-fauzan, *Rinkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta: PT Darul Falah, (2005), hal. 1039

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan pemberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri sipembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauman manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah. Kesadaran yang demikian keadaannya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memmberantas kejahatan, karna seseorang sebelum ia melakukan kejahatan maka ia akan berfikir bahwa tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya.

Merujuk pada Hukum Positif, sebelum timbulnya teori terbaru tentang tujuan hukum, hukum positif telah mengalami beberapa fase hukuman yakni²⁵:

a. Fase Balasan Perseorangan

Pada fase ini urusan hukuman berada di tangan perseorangan (korban atau walinya) yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri kehendak membalas orang yang menyerangnya. Oleh karena itu pada pembalasan tersebut tidak ada batasanya, dan kadang-kadang melebihi dari perbuatan sendiri, bahkan menimbulkan perang antara suku atau golongan.

b. Fase Balasan Tuhan²⁶

Yang dimaksud balasan tuhan disini adalah bahwa pembuat harus menebus kesalahanya, dengan pembalasan umum agar pembuat merasa

²⁵ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*,hal. 257

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jera dan orang lain takut untuk meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan atau penumpasan tidak lepas dari segi negatifnya. Antara lain ialah bahwa hukuman tersebut sering disertai dengan perbuatan yang berlebih-lebihan dan melalui batas, serta banyak hukuman mati. Artinya pada fase ini aturan-aturan tuhan merupakan suatu ketetapan yang harus dilaksanakan dengan mengenyampingkan keadaan dipelaku kejahatan, seperti sebagaimana yang membunuh harus di *qisash*, dan seseorang mencuri haruslah dipotong tangannya, kedua aturan itu adalah ketetapan pasti dalam al-qur'an, maka wajib untuk dijalankan.

c. Fase kemanusiaan²⁷

Akan tetapi pada fase kemanusiaan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri pembuat telah mulai dipakai. Pada fase tersebut munculah teori kontrak sosial yang mengatakan bahwa perseorangan terlepas dari kekuasaan negara, kecuali sebagian kecil saja dari kemerdekaan itu yang diberikan pada masyarakat, ketika ia bercampur dengannya yaitu bagian kemerdekaan yang diperlukan untuk menjaga keselamatannya. Pada fase ini juga muncul teori yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batasan-batasan keadilan dan kepentingan sosial.

d. Fase keilmuan²⁸

Fase keilmuan munculah aliran Itali yang didasarkan pada tiga faktor. *Pertama* hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu

²⁷*Ibid.*, hal. 258

²⁸*Ibid.*, hal. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah, dengan cara mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk mengikutinya. *Kedua* macam, masa, dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan yang abstrak yang mengharuskan diperlakukannya pembuat-pembuat jarimah dalam tingkatan dan keadaan yang sama. Dan besar kecilnya hukuman tergantung keadaan pelaku jarimah. *Ketiga* kegiatan masyarakat dalam memerangi *jarimah* selain ditujukan pada pelaku jarimahnya juga ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor yang menimbulkan jarimah tersebut.

3. Macam-macam Hukuman

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan menurut segi tinjauannya²⁹.

١ العقوبات الأصلية

Hukuman pokok seperti hukuman *Qisas* untuk jarman pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian

٢ العقوبات البدلية:

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu hukuman untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qisas*. Demikian juga hukuman *ta'zir* juga

²⁹*Ibid.*, hal 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir* sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-jarimah hudud atau *qisas* dan *diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.

٣ العقوبات التبعية :

Hukuman tambahan adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisas*, atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang berzina) disamping hukuman pokoknya yaitu jilid delapan puluh kali. Artinya hukuman tambahan merupakan hukuman yang bersifat efek terhadap jarimah yang dilakukannya.

٤ العقوبات التكميلية :

Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Dari pembagian diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukuman itu hanya dua yakni hukum pokok dan hukuman pengganti. Namun dengan berbagai pertimbangan yang dijatuhkan maka hukum tersebut memiliki perkembangan yang dijadikan alternatif untuk menjatuhkannya, seperti hukuman tambahan yang merupakan efek yang ditimbulkan atas hukuman pokok dan hukuman pengganti, sehingga jika memungkinkan hakim memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang untuk menjatuhkan hukuman lain disamping hukuman tambahan dan inilah yang disebut hukum pelengkap.

Menurut tempatnya dilakukannya hukuman dibagi menjadi tiga³⁰:

1. Hukuman badan yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa seseorang bukan badanya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
3. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

Sedangkan ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman digolongkan kedalam empat bagian yaitu:

1. Hukuman hudud yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan jarimah-jarimah hudud. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan sebagai hak Allah SWT atau hukuman yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hukuman hudud terbagi menjadi tujuh bagian sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud yaitu:
 - Zina.
 - Qazaf
 - Meminum minuman keras
 - Mencuri
 - Melakukan hirabah (gangguan keamanan)
 - Murtad.

³⁰*Ibid.*, hal. 262

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dan memberontak.

Tujuh macam jarimah diatas memiliki dasar-dasar hukum yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, sehingga suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya.

2. Hukuman *Qisas* dan *Diyat* yaitu hukuman yang telah ditetapkan atas jarimah-jarimah *Qisas* dan diyat. *Qisas* merupakan hukuman bagi pelaku jarimah dimana dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengankan diyat merupakan tebusan yang harus dibayar atas kejahatan yang dilakukan. Adapun dasar hukum Qisas ini terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah 178-179

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَّأُولَى الْأَلْبَبِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedis. dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah 178-179).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa *qisas* ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishas* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishas* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. Jarimah-jarimah *qisas-diyat* dibagi atas lima bagian diantaranya, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3. Hukuman *kafarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qisas* dan dan beberapa *jarimah ta'zir*. *Kafarat* adalah membebaskan seorang hamba mu'min, jika tidak bisa wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, jadi puasa merupakan hukum pengganti yang tidak akan terjadi jika hukuman pokok bisa berjalan dengan baik. Selain pembunuhan yang tidak sengaja perbuatan-perbuatan ma'siat yang terkena *kafarat* adalah:

- a. Perusakan puasa
- b. Perusakan ihram

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melanggar sumpah.
- d. Menggauli istri pada waktu datang bulan.
- e. Menggauli istri sesudah mendhiaharnya.

4. Hukuman Ta'zir,

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana-tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* ta'dib, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan).³¹ Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tindak pidana *ta'zir*, dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya³². Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bantuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, dijatuhkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.³³ Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* itu diantaranya:

1. Hukuman mati

Sebagaimana diketahui *ta'zir* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tujuan *ta'zir*

³¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I (Bogor : Karisma Ilmu, 2007), hal. 100

³² H.A Djazuli. *Op.cit.*, hal. 89

³³ H rahmat Hakim. *Op.cit.*, hal. 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mengubah sipelaku menjadi orang yang lebih baik tidak lagi melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain. Pada dasarnya semua ulama membolehkan hukuman mati ini sebagai bentuk hukuman *ta'zir*. Apabila ada kemanfaatan dan keadaan pun menuntut untuk itu.

2. Hukuman jilid

Dalam masalah *ta'zir* hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Jumlah jilid bagi jarimah *ta'zir* itu tidak boleh melebihi hukuman *ta'zir* pokok, yaitu 40 kali bagi peminum khamar, 80 kali bagi penuduh zina dan seratus kali bagi pezina ghair mughsan. Maka dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* berupa jilid tidak boleh melebihi hukuman pokok, sementyara dalam perbuatan mendekati zina hukumannya tidak boleh melebihi seratus kali jilid³⁴. Sedangkan mazhab maliki berpendapat bahwa jarimah *ta'zir* adalah hak penguasa maka batasan jumlah hukuman *ta'zir* harus diserahkan pada penguasa yang mempunyai hak yaitu ulil amri. Hukuman *ta'zir* berdasarkan atas kemaslahatan umum³⁵

3. Hukuman penjara

Penjara dalam hukum Islam dipandang bukanlah hukuman utama. Hukuman penjara terbagi dua. Pertama hukuman penjara yang terbatas yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan ter hukum, sedangkan hukuman

³⁴*Ibid.*, hal. 158

³⁵*Ibid.*, hal. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara yang tidak terbatas dapat dilakukan seumur hidup pelaku, sampai mati atau sampai pelaku bertaubat. Maka hukuman penjara ini berlaku bagi *jarimah* yang berat saja³⁶

Melihat jenis hukuman diatas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman alternatif yang memiliki banyak jenis dan bentuk, sehingga hakim dalam memutuskannya sesuai dengan kebutuhan dan jenis *jarimah* yang dilakukan.

C. Gabungan dalam hukuman (*Ta'addud al-jaraim*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan dalam tindakpidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana namun masing-masing tindak pidana tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Gabungan tindak pidana adakalanya berbentuk semu saja, dan ada kalanya berbentuk nyata³⁷.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan gabungan melakukan *jarimah* menurut hukum Islam ada dua, yaitu:

³⁶ *Ibid.*, hal. 163

³⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Bogor : Karisma Ilmu, 2007), hal. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَمْ يَأْأَوْيَقْتُلُوا أَنْ فَسَادًا لِّلْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ تَحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَأُوا إِنَّمَا
 زَيُّ لَهُمْ ذَلِكَ لِّلْأَرْضِ مِنْ يَنْفُوا أَوْ خَلْفِ مَنْ وَأَرْجُلُهُمْ تُقَطَّعُ أَوْيَصَ
 عَظِيمٌ عَذَابٌ إِلَّا خِرَةً فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Gabungan tindak pidana semu adalah apabila pelaku memperbuat suatu perbuatan yang terkena oleh bermacam-macam ketentuan hukuman seperti seorang yang menganiaya petugas yang menjalankan tugasnya, maka selain tindak pidana penganiayaan dia juga melawan petugas. sedangkan Gabungan tindak pidana nyata adalah apabila terjadi beberapa perbuatan dari pelaku sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri seperti seseorang yang melukai orang lain kakinya dan orang yang berbeda ditikam dengan tangannya, maka dia melakukan penganiayaan dan pembunuhan³⁸.

Perbedaan antara gabungan hukuman dengan pengulangan tindak pidana adalah pada gabungan hukuman, pelaku melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari tindak pidana itu belum mendapat keputusan hakim. Sedangkan pengulangan tindak pidana adalah pelaku melakukan

³⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana kedua setelah dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang pertama³⁹.

Bergandanya hukuman sudah dikenal oleh hukum Islam semenjak kemunculannya, tetapi tidak keseluruhannya diambil. Bergandanya hukuman dibatasi oleh dua teori, yaitu teori saling melengkapi (*Nazariyyah al Tadhakhul*) dan teori penyerapan (*Nazariyyah al Jabb*). Dan Teori Percampuran (*al Mukhthalath*)

1. Teori Saling Melengkapi (*Nazariyyahal Tadakhul*)

Pengertian saling melengkapi adalah ketika terjadi penggabungan perbuatan (tindak pidana), hukumannya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu perbuatan. Teori ini didasarkan pada dua prinsip.⁴⁰

Pertama meskipun perbuatan tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis semuanya itu satu macam seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang, perzinahan berulang-ulang atau fitnahan secara berulang-ulang hukuman atas perbuatan tersebut saling melengkapi. Artinya hanya dikenai satu macam hukuman saja selama belum ada keputusan hakim karena jika pelaku melakukan satu perbuatan jarimah yang sama setelah ada keputusan hakim, si pelaku tetap harus tetap dijatuhi hukuman yang lain. Dalam hal ini bukan, bukan penjatuhan hukumannya yang dipertimbangkan, melainkan pelaksanaan hukuman. Karena itu setiap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaksanaan hukuman maka

³⁹*Ibid.*, hal. 140

⁴⁰*Ibid.*, hal. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman-hukumannya saling melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanakan⁴¹.

Menurut teori yang unggul beberapa perbuatan dianggap satu macam saja selama objeknya adalah satu meskipun berbeda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokan (*hirabah*) keduanya dikategorikan sebagai pencurian, juga seperti *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan* keduanya adalah perzinahan, dalam keadaan seperti ini hukuman yang paling berat yang harus dilaksanakan. Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja karena pada dasarnya satu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan/pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Apabila tujuan ini dapat terealisasi hanya dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama selama hukuman tersebut dapat membawa hasil dan mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana yang ia lakukan⁴².

Kedua meskipun perbuatan tindak pidana yang dilakukan itu berganda dan berbeda-beda macamnya, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup hanya dijatuhi satu hukuman dengan syarat hukuman yang dijatuhkan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama⁴³.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman meminum minuman keras dan *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina) saling melengkapi. Artinya mazhab ini menggunakan teori penyerapan karena si pelaku hanya

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.*, hal. 143

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijatuhi satu hukuman. Alasan mereka tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah mencegah tindakan kebohongan yang dilakukan, karna orang yang meminum minuman keras sering mengigau dan perkataanya tidak bisa dipercaya⁴⁴.

Mazhab-mazhab yang lain tidak sependapat dengan mazhab maliki mengenai contoh tersebut karena hukuman *qazaf* bertujuan untuk melindungi kehormatan sedangkan hukuman meminum minuman keras bertujuan untuk melindungi akal, jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya.

Jika hukuman-hukuman dari tindak pidana yang bermacam-macam itu mempunyai kesatuan hukumannya, seperti seseorang yang mencuri, kemudian berzina dan kemudian menuduh orang lain berzina, hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan itu tidak saling melengkapi tapi dijatuhkan semuanya.

2. Teori Penyerapan (*Nazariyyatul Jabb*)

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukum tersebut ialah tak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain⁴⁵.

Di kalangan fuqaha, belum ada kesepakatan tentang penerapan teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal

⁴⁴*Ibid.*, hal. 144

⁴⁵*Ibid.*, hal. 144

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan keberadaan teori tersebut, sedangkan Imam Syafi'i tidak menetapkannya, mereka yang menetapkan juga berbeda pendapat tentang sampai dimana daerah berlakunya teori ini⁴⁶.

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman *hudud* yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti pada tindak pidana *riddah*, atau dengan hukuman *qisas* sebagai hak seseorang, maka hukuman *hudud* tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hukuman mati telah menyerap hukuman yang lain, lain halnya dengan pada tindak pidana *qazaf*, hukumannya tetap dilaksanakan kemudian dibunuh.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana *hudud* sebagai hak Allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri, berzina *muhsan*, mabuk, dan melakukan perampokan, hanya dengan hukuman mati dapat menggugurkan semua hukuman tersebut. Bila hukuman *hudud* berkumpul dengan hak manusia, maka hak-hak manusia harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak Allah diserap oleh hukuman mati⁴⁸.

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah (hak masyarakat umum) maka hak manusialah yang didahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut telah dilaksanakan, maka hak Allah tidak bisa dijatuhkan lagi. Hak Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan dan hak Allah ini lebih dari satu maka lakukan satu hak saja

⁴⁶*Ibid.*, hal. 145

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dijatuhkan, yaitu hak yang dapat menggugurkan hak hukuman lain.

Imam Asy-syafi'i tidak mengakui adanya teori penyerapan. Menurutnya, semua hukuman harus dilakukan selama tidak saling melengkapi. Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hak Allah yang bukan hukuman mati, setelah itu baru hukuman mati. Contohnya apabila pada diri seseorang berkumpul beberapa hukuman had, seperti had zina *ghair muhsan*, *hadqazaf*, had pencurian, had gangguan keamanan, serta hukuman *qisas* dengan karena membunuh, urutan penjatuhan hukuman tersebut adalah: *hadqazaf* sebanyak delapan puluh dera, kemudian ditahan sampai sembuh, untuk kemudia dijatuhi *had* zina sebanyak seratus dera, kemudia ditahan lagi sampi sembuh, untuk kemudian dilaksanakan had pencurian yaitu potong tangan. Terakhir dijatuhi hukuman mati. Jika dalam proses hukuman tersebut pelaku mati, maka hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian Imam Asy-syafi'i mengakhiri hukuman mati karena ia tidak menggunakan teori penyerapan⁴⁹.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 146